

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD DJUNAEDI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **713960**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **550.000.000**

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA MALANG, LAINNYA Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/140 m2 di KAB / KOTA MALANG, LAINNYA Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **9.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT. NC11BF1CB AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **9.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **200.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **568.200.000****III. HUTANG** **Rp.** **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **568.200.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI SAWITRI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 459282

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 366.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/110 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 366.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.062.637

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 520.562.637

III. HUTANG Rp. 178.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 342.562.637

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENI SUMADI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 217646

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.275.000**

1. MOBIL, TOYOTA ZIENTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 182.075.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.300.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 17.855.694**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 858.730.694**

III. HUTANG **Rp. 160.334.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 698.396.694**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANNAH PERMATA INDAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 736390

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.520.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.864.408
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	78.384.408

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 78.384.408

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**IKHTISAR LHKPN a.n NOVI NURAINI
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2021)
NIK 3175095711740001**

1. DATA PRIBADI

Nama	:	NOVI NURAINI
NIK	:	3175095711740001
No KK	:	3175091901110040
NPWP	:	094718780009000
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	JAKARTA/17 November 1974
Status Nikah	:	Belum Kawin
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	TIRTA TIARA REGENCY A2-12 TIRTASANI MALANG, KARANGPLOSO, MALANG, JAWA TIMUR
Nomor Handphone	:	082139995941
Email	:	novinuraini@pertanian.go.id
NHK	:	-
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	KEMENTERIAN PERTANIAN
Jabatan	:	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
Tanggal Lapor	:	31 Desember 2021
Tanggal Kirim	:	1 Februari 2022
Status	:	Perlu Perbaikan



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	ARIEF KURNIAWAN	SUAMI	JAKARTA , 24 Juni 1971 / LAKI-LAKI	SWASTA	TIRTA TIARA REGENCY A2-12 TIRTASANI MALANG, Kelurahan KEPUHARJO, Kecamatan KARANGPLOSO, Kabupaten/Kota MALANG, Provinsi JAWA TIMUR

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KEMENTERIAN PERTANIAN	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : JL. GUDANG AIR NO. 16 A, RT 002 RW 02 Kel. / Desa : RAMBUTAN Kecamatan : CIRACAS Kab. / Kota : KOTA JAKARTA TIMUR Prov. / Negara : DKI JAKARTA / INDONESIA	Tanah: 750 m ² Bangunan: 350 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: SHM NO 03906 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: WARISAN Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2020	Rp. 0	Rp. 3.000.000.000	-
Sub Total					Rp. 3.000.000.000	



4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL Merk : SUZUKI ERTIGA Model : GL Tahun Pembuatan : 2018 No. Pol. / Registrasi : B 2150 TZY	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2018	Rp. 0	Rp. 150.000.000	-
Sub Total				Rp. 150.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : HARTA BERGERAK LAINNYA Jumlah : 2 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Kendaraan roda 4 Tahun Perolehan: 2021	HASIL SENDIRI	Rp. 0	Rp. 120.000.000	-
Sub Total				Rp. 120.000.000	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	



4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
			Sub Total	Rp. 0	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
			Sub Total	Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 180.000.000	Rp. 300.000.000
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 24.000.000	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 209.000.000	Rp. 325.000.000

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
----	------------------	----------------------



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 350.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 7.000.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 9.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 24.000.000
Sub Total		Rp. 390.000.000



6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------



8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 3.270.000.000	Rp. 0	Rp. 3.270.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARASWATI AYU PURBARANI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 815340

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	49.000.000
1. MOBIL, HONDA CIVIC GENIO Tahun 1993, HASIL SENDIRI	Rp.	
40.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.344.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	62.364.248
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	136.708.248
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	136.708.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYA BUDHI UDRAYANA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 496854

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 90.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 23.167.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 1.463.167.000**

III. HUTANG **Rp. 381.800.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.081.367.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ugik Romadi
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 186238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/105 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
4. Tanah Seluas 465 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 114.000.000**

1. MOBIL, Toyota Rush TRD Sportivo Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, Honda Supra X 125 Supra X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, Honda Vario Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 13.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.147.000.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.147.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.